



Kami Hidup Seperti Digantung

■ Buruh Tolak Penetapan UMK/UMP DIY 2022

YOGYA, TRIBUN - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Rabu (24/11). Mereka menggelar aksi damai menolak penetapan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota (UMP/UMK) tahun 2022 yang telah ditetapkan Gubernur DIY belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, para pekerja juga menggelar aksi simbolik yakni dengan membawa boneka manekin yang digantung dengan tali rafia. Boneka itu didandani sedemikian rupa menggunakan sepatu, setelan kemeja berwarna putih, celana panjang hitam, dan helm pengaman berwarna putih.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang juga tergabung dalam MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan menuturkan, boneka itu menyimbolkan kondisi buruh saat ini. Kendati UMP DIY mengalami

kenaikan sebesar 4,3 persen, menurutnya jumlah tersebut masih tergolong rendah. Sebab, upah DIY belum melampaui nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Hal ini membuat buruh mengalami defisit penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. "Hidupnya seperti digantung karena tidak bisa memenuhi KHL dan hidup layak," jelas Irsyad, di sela-sela aksi.

Menurut penghitungannya, upah DIY harusnya melampaui Rp3 juta. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan KHL yang dilakukan serikat pekerja. Dia melanjutkan, DIY sebagai provinsi dengan predikat Keistimewaan seharusnya mampu mewujudkan penghidupan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

"Perlu kami tolak karena upah yang ditetapkan tidak bisa untuk mencukupi KHL. Percuma saja ada kenaikan upah minimum tapi tidak bisa memenuhi KHL," katanya.

Menurutnya, upah murah telah menjadi masalah kronis di wilayah ini. "Kami mengharapkan adanya upah yang baik agar angka kemiskinan dan ketimpangan berkurang. Gubernur juga perlu memberi kompensasi kepada guru berupa subsidi pangan, transportasi, dan pendidikan," tandasnya.

Tampung aspirasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarman Baskara Aji angkat bicara terkait tuntutan buruh. Pemda DIY dikatakan bakal menampung segala aspirasi masyarakat. Menurutnya, kondisi pengupahan di DIY telah membaik. Sebab, upah wilayah ini sudah tidak menjadi yang terendah. Yakni, berada di peringkat 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

"Karena kita pakai pertumbuhan ekonomi daerah maka kinerja ekonomi daerah yang mempengaruhi kenaikan," jelasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005